

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)**

*Stewardship theory* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi mementingkan *principal*. (Donaldson dan Davis, 1991). Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya bertindak dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Manajemen melaksanakan tindakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan *stakeholder* yaitu: rakyat, pemegang saham, penanam modal, dan kreditur. Manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas dari atasannya secara penuh tanggungjawab.

Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu prinsip bahwa pemerintah sebagai manajer merasa mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan cara lebih bijaksana dan berhati-hati untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. LKPD dibuat oleh pemerintah daerah akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya yang nantinya akan

digunakan untuk pengambilan keputusan. Kinerja pemerintah daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawaban dalam realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

## **2. Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan merupakan catatan informasi suatu entitas pada suatu periode yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses akuntansi yang menunjukkan bagaimana informasi dalam laporan keuangan tersebut disajikan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai sumber daya ekonomi, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan dan membantu agar laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. (Suwardjono, 2005).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah terlaksana dan tercapai secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

### **a. Akuntabilitas**

Tanggung jawab dalam pengelolaan sumber atas pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan suatu entitas pelaporan keuangan dalam suatu periode pelaporan, sehingga mempermudah pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas.

c. Transparansi

Menyediakan informasi laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai wewenang untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi

Memantu oara pemakai dalam mengetahui kecakupan penerimaan pemerintah pada suatu periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **3. Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat tercapai maka informasi yang disajikan harus mempunyai nilai dan

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

(Suwardjono, 2005)

Keterandalan merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pemakai informasi tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Jadi, informasi yang diperoleh dari data yang digunakan bias teruji keandalannya untuk meraih tujuan yang diinginkan baik personal maupun organisasi.

#### **4. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Ketepatanwaktuan merupakan salah satu dalam karakteristik nilai informasi yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan dalam pembuatan laporan keuangan. (Suwardjono, 2005)

Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi dikarenakan ketepatanwaktuan itu informasi tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang diambil.

Vidiasari (2012) mendefinisikan ketepatanwaktuan dalam dua cara; 1) ketepatanwaktuan didefinisikan sebagai keterlambatan pelaporan keuangan dari tanggal laporan sampai dengan tanggal melaporkan. 2)

ketepatanwaktuan ditentukan dengan waktu relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

## **5. Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. (Widodo dalam Kharis, 2010). Dalam SKPD untuk mewujudkan kualitas informasi pelaporan keuangan yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pemerintah daerah, kegagalan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan oleh pemakai informasi dan juga tidak dapat disampaikan secara tepat waktu karena terdapat hambatan dalam pengelolaan keuangan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama agar laporan keuangan dapat diandalkan.

## **6. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan proses elektronik yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara. Teknologi informasi digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan dapat disampaikan secara tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Jogiyanto, 1990).

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), jaringan internet, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi 1) pengolahan data dan informasi, proses kerja secara elektronik dan sistem manajemen. 2) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat di akses oleh masyarakat luas dengan mudah dan cepat. (Sukirman, 2013)

## **7. Pengendalian Intern Akuntansi**

Pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut *Committee Of Sponsoring Organization* (COSO, 1994) mendefinisikan bahwa pengendalian intern sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran kekayaan yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan. (Indriasari, 2008)

## **8. Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan dapat digunakan untuk perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. (Yosa, 2010)

Terdapat jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan intern, dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jendral pada setiap kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah Pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

- b. Pengawasan ektern, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
- d. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD**

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Dalam menghasilkan nilai informasi yang bernilai yaitu keterandalan menyangkut informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai kemampuan dalam memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian kemampuan sumber daya manusia yang menghasilkan informasi tersebut dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai yaitu keterandalan. (Wahyono, 2004)

Dalam pengelolaan keuangan SKPD apabila sumber daya manusia tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan akhirnya kualitasnya menjadi buruk. Selain itu jika kualitas sumber daya manusia rendah akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan berdampak pada buruknya penyajian laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roshanti (2014) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, serta penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2009) dimana hasil penelitiannya adalah sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian pertama yaitu:

**H<sub>1</sub> : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD.**

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi daerah kepada publik.

Pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pelaporan keuangan daerah, agar laporan keuangan daerah tetap diandalkan maka perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memproses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses unit kerja dan membangun sistem informasi manajemen.

Manfaat dari perkembangan teknologi informasi dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat karena teknologi informasi memberikan hasil operasi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengurangi *human error*.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari (2008) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian tersebut juga dilakukan oleh Damayanti (2014) dan Winidyanungrum dan Rahmawati (2010) yang memperoleh bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang kedua yaitu:

**H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD.**

### **3. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD**

Pengendalian intern bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Hasil evaluasi pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih ditemukanya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan.

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi menjadi subjek terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pengendalian intern merupakan pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk perbaikan di masa mendatang dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriasari (2008) memberikan bukti empiris bahwa pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Rosalin (2011) memberikan bukti bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dari uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang ketiga yaitu:

**H<sub>3</sub> : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD**

#### **4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD**

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tuasikal, 2007)

Pengawasan diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif. Yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Apabila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau

hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah dapat berjalan secara maksimal

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Primayana (2014) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Anggraeni (2014) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Dari uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang keempat yaitu:

**H<sub>4</sub> : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD**

#### **5. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD**

Kapasitas Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*), dan hasil-hasil (*outcomes*).

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya menyebabkan buruknya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tugas dan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat dalam penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roshanti (2014) hasil penelitian menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Zuliarti (2012) menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dari uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang kelima yaitu:

**H<sub>5</sub> : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan SKPD**

## **6. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan SKPD**

Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan dan transaksi dan menyajikan laporan keuangan pemerintah agar laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi untuk mempengaruhi keputusan yaitu *timeliness*/ketepatanwaktuan.

Pemanfaatan teknologi informasi meliputi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang tepat waktu.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian juga dilakukan oleh Roshanti (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Dari uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang keenam yaitu:

**H<sub>6</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan SKPD**

## **7. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan SKPD**

Pengawasan pemerintah daerah ditujukan untuk menjamin bahwa pemerintah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan buruknya dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya dalam penyusunan laporan

keuangan, pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

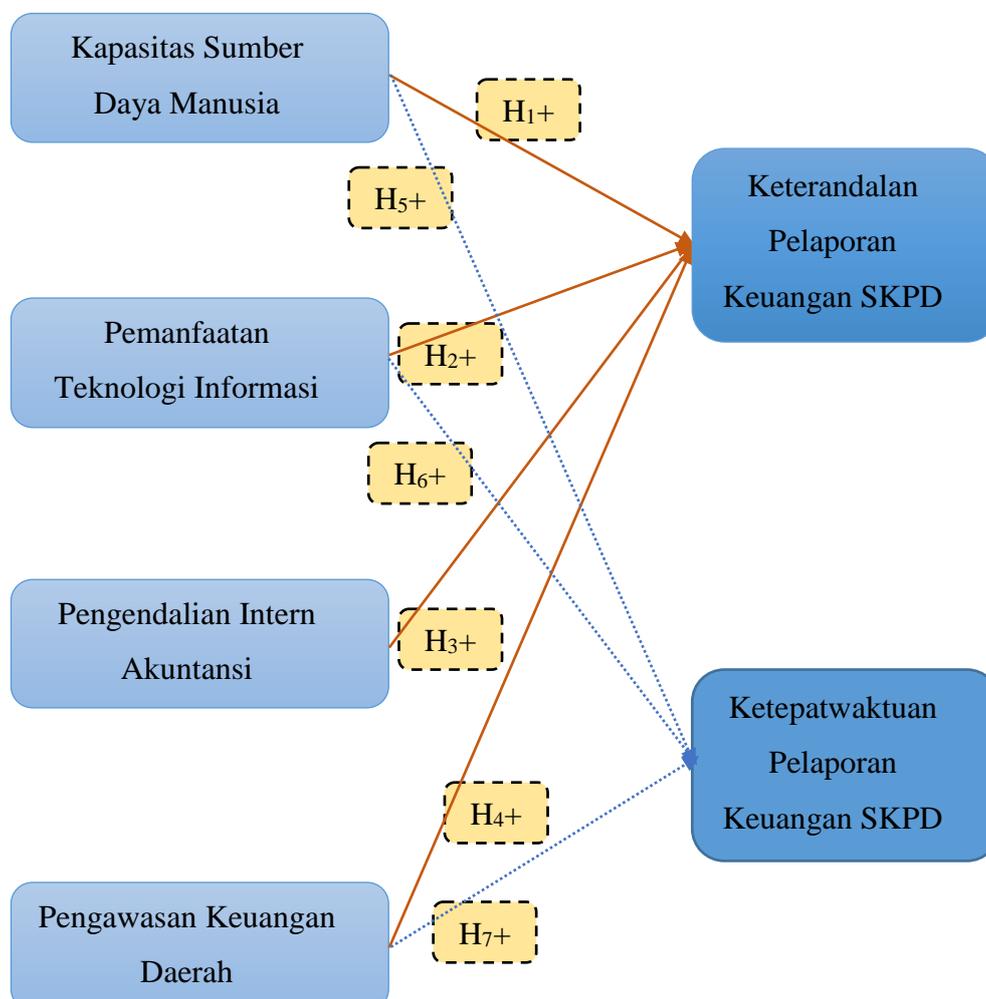
Didalam prosedur pengawasan mencakup mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Jika informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak akan mempunyai nilai lagi karena tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisaputra (2011) dan Fikri (2011) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Dari uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis penelitian yang ketujuh yaitu:

**H<sub>7</sub> : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan SKPD**

### C. Model Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dibentuk kerangka konseptual (pemikiran) untuk mempermudah dalam melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan SKPD. Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**